



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 18 April 2017

Halaman: 11

Jukir Khawatir Jumlah Wisatawan Menurun

● Aktivis Minta Konsep 'Park and Ride' Segera Diterapkan

YOGYA, TRIBUN - Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta mengaku khawatir dengan rencana penerapan tarif mahal dan progresif di kawasan utama wisata dan padat lalu-lintas Kota Yogyakarta. Kekhawatiran para juru parkir (jukir) ini tak lain karena jumlah wisatawan menjadi berkurang.

"Terlalu berat (bila tarif parkir mahal untuk mengatasi kemacetan) bagi pelaku wisata. Wisatawan njur ora payu (wisatawan menjadi tidak laku)," ujar Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto, kemarin.

Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan yang menjadi persoalan klasik di Kota Yogyakarta, harus dimulai dari pembenahan berbagai aspek. Diantaranya, Kota Yogyakarta harus berbenah dalam hal pembangunan infrastruktur.

D samping itu, ada pengaturan tempat parkir dan manajemen lalu-lintas saat akhir pekan. Jika seluruh aspek ini dikerjakan dengan maksimal, maka semuanya akan menjadi lebih nyaman. Termasuk, kemacetan bisa terurai.

Mantan Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto pun angkat bicara dengan rencana ini. Dia justru memandang penguatan moda transportasi publik menjadi lebih penting untuk mengatasi kemacetan. Menurutnya, trayek bus Trans Jogja seharusnya diperluas dan harus ada koneksi antar trayek. "Dimana tiket berlaku harian atau bulanan. Kemudian ke trayek manapun dan menyambung berapa kali pun, cukup bayar sekali," ujarnya.

Dia juga berharap, bus Trans Jogja akan menjadi pilihan alternatif utama untuk berangkat dan pulang kerja bagi para pekerja atau pelajar. Pada intinya, kata dia, moda transportasi publik akan menjadi transportasi utama bagi pekerja dan pelajar secara rutin.

"Kalau Trans Jogja berjalan sesuai konsep awal dan sego segawe dihidupkan lagi, serta tidak ada kredit motor dan mobil. Paling penting

wali kotanya peduli (bisa mengatasi kemacetan)," imbuh Sudrajat Selorudjito, mantan anggota DPRD Kota Yogya.

Semakin Mahal

Aktivis pemerhati lingkungan Kota Yogyakarta, Elanto Wijoyono menjelaskan, salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan memang ruang parkir untuk kendaraan bermotor pribadi harus semakin terbatas dan semakin mahal, tidak hanya di objek wisata. Hal ini menjadi bagian dari pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Elanto menilai, parkir di tepi jalan umum sudah seharusnya dikurangi izinya, jika perlu ada moratorium penerbitan izin parkir di tepi jalan umum. Selain itu, pemaksimalan kantong-kantong parkir juga harus dilaksanakan.

"Pemaksimalan dengan tarif yang lebih mahal. Hanya masalahnya, kebijakan seperti ini harus dibarengi dengan kesiapan Pemko dan Pemprov menyediakan layanan transportasi publik yang layak dan aksesibel ke seluruh wilayah kota," jelasnya.

Jika layanan transportasi publik belum bisa maksimal, kata dia, kebijakan pembatasan ruang parkir kendaraan bermotor pribadi harus dilakukan bertahap. Konsep park and ride, ulasnya, juga sudah saatnya diwujudkan, khususnya di simpul-simpul layanan transportasi publik, seperti di stasiun, terminal, dan shelter Trans Jogja.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga dipandang perlu koordinasi dengan Pemkab dan Pemprov, karena ruang yang dibutuhkan untuk park and ride tidak mesti di dalam wilayah Kota Yogyakarta. "Pemkot juga harus lebih serius menyediakan sarana prasarana yang lebih baik untuk pengguna kendaraan nonmotor. Hal ini, agar kebiasaan sebagian warga kota Yogyakarta untuk berkendara dengan kendaraan bermotor pribadi bisa mulai dialihkan ke kendaraan nonmotor," ulasnya. (als)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005